

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI KOTA BANDAR LAMPUNG KE KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN EKONOMI MASYARAKAT

OLEH

HADI PURWANTO

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang berkembang maju pesat dalam pembangunan, dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsinya. Perkembangan yang bermobilisasi di pusat pemerintahan ini menyebabkan banyak permasalahan yang muncul khususnya mengenai pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan penataan ruang dan wilayah dengan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pelaksanaannya justru terdapat permasalahan-permasalahan baru yang muncul yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menganalisis kebijakan ini patut dilakukan untuk mengetahui nilai efektivitas dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di instansi-instansi terkait kebijakan ini yaitu Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, dan Badan Pengelola Kota Baru Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perumusan dan penyusunan kebijakan, mengetahui alasan dan nilai yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan disandingkan dengan tahapan model rasional komprehensif dalam kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan rancangan peraturan daerah ini tidak ideal dan dapat dikategorikan kedalam model kelembagaan. Ini disebabkan ide/gagasan berasal dari inisiatif gubernur terdahulu Bpk. Sjachroedin ZP dan tidak adanya alternatif-alternatif lain dalam proses pemecahan masalah, sehingga tidak ada pembandingan untuk menentukan atau memilih alternatif yang terbaik. Dalam proses perumusan kebijakan, pembuat kebijakan juga dinilai kurang teliti dan cermat dalam

menentukan alternatif pemecahan masalah, baik dari segi biaya, waktu ataupun sebab-akibat yang akan dimunculkan dari kebijakan tersebut. Ini dibuktikan pada perkembangannya, kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung ini dihentikan untuk sementara oleh gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sampai waktu yang belum ditentukan. Perlu ada alasan-alasan yang rasional untuk menilai apakah sebuah program pembangunan itu layak dilanjutkan atau tidak. Harus dipahami sebuah kebijakan mengandung risiko untuk gagal karena berbagai faktor. Tetapi, sepanjang kebijakan tersebut dari sudut pandang kapasitas implementasi memungkinkan untuk dilaksanakan, memiliki tujuan bernilai menguntungkan kepentingan publik, dan mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan.

Kata kunci: *Analisis Proses, Perumusan Kebijakan Publik, Pengembangan Wilayah*